

ABSTRAK

Pengendalian penduduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh daerah otonom. Kota Magelang sebagai salah satu daerah otonom berwenang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren berupa pengendalian penduduk melalui perangkat daerah berupa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Magelang yang secara khusus oleh Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pengendalian penduduk merupakan hal penting mengingat karakteristik geografis dan demografis yang dimiliki oleh Kota Magelang.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan doktrinal (yuridis normatif). Spesifikasi dalam penelitian itu termasuk ke dalam spesifikasi penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data publik dan bahan hukum. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Pengendalian penduduk oleh Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Magelang dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana (KB), Program Pelayanan Obat, Alat dan Cara Kontrasepsi, Program Generasi Berencana (GenRe) dan Program Sekolah Siaga Kependudukan. Dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk terdapat permasalahan terkait dengan kelembagaan, sarana dan peran serta masyarakat. Dalam mengatasi permasalahan tersebut Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Magelang memiliki pendekatan dan solusi yang berbeda-beda.

Saran yang diberikan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengendalian penduduk berkaitan dengan kelembagaan. Secara khusus mengenai lembaga eksternal yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pengendalian Penduduk